

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK

**Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H.,M.H.**

**Made Emy Andayani Citra, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

yogi\_arthani@yahoo.com.

### **Abstract**

*Many cases of malpractices happening from 2006 to 2012, there were 182 cases of medical negligence and malpractice is proven to be done by doctor in Indonesia, it makes the legal protection for patients as consumers of health care services very important to be discussed. Lack of understanding about the rights of their patients causing the patient being in a weak position as consumers of health care services. In this journal will discuss the relationship between patient and doctor, patient rights and resolving malpractice disputes. Through this research is expected to give a brief information for a better comprehension about patient's rights and what actions can be taken if experiencing the malpractice in health care services.*

**Keywords:** *Legal protection, health care services, malpractice.*

### **Abstrak**

Banyak kasus malpraktik yang terjadi dari tahun 2006 sampai 2012, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik dan malpraktik yang terbukti dilakukan oleh dokter di Indonesia, hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pelayan medik sangat penting untuk didiskusikan. Kurangnya pemahaman terhadap hak tentang pasien menyebabkan pasien memiliki posisi yang lemah sebagai konsumen pelayan publik. Dalam jurnal ini, akan dibahas tentang hubungan antara pasien dan dokter, hak pasien dan penyelesaian sengketa malpraktik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi singkat untuk dapat memahami lebih baik tentang hak-hak pasien dan tindakan apa yang dapat diambil jika mengalami malpraktik dalam pelayanan kesehatan.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, pelayanan kesehan, malpraktik.

### **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Haruslah disadari bahwa pada dasarnya pasien selaku konsumen pelayan medis sering kali dalam posisi lemah. Beberapa dekade ini hubungan antara rumah sakit dan dokter selaku produsen jasa layanan kesehatan dengan pasien selaku konsumen belum harmonis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus malpraktek yang marak terjadi sejak 2006 hingga 2012, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik (*medical negligence*) dan malpraktek (*malpractice*) yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Malpraktek ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).<sup>1</sup>

Dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bisa lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode etik pun bisa terjadi, bahkan mungkin sampai melakukan suatu pelanggaran norma-norma hukum. Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad berpendapat, bahwa belum ada parameter yang tegas tentang batas pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Demikian juga kerancuan pemahaman atas masalah

*medical malpractice* (kesalahan profesional medis), masih sering dianggap sebagai pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi pidana.

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.<sup>3</sup>

Kelalaian medik dapat digolongkan sebagai malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian medik, dengan perkataan lain malpraktek mempunyai cakupan yang lebih luas daripada kelalaian medik. Perbedaan yang lebih jelas dapat terlihat dari istilah malpraktek yang selain mencakup unsur kelalaian, juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dilakukan dengan sadar dan akibat yang terjadi merupakan tujuan dari tindakan tersebut walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya

1 SG Wibisono, 2013, "Sampai Akhir 2012, Terjadi 182 Kasus Malpraktek" <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/Terjadi-182-Kasus-Malpraktek>

2 Anny Isfandyarie, 2006, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.10.

3 Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hal. 5.

dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan tanpa alasan (indikasi) medis yang jelas, melakukan operasi pada pasien yang sebenarnya tak perlu dioperasi, memberikan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar.

Sebaliknya, istilah kelalaian medik biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*), kurang hati-hati, tidak peduli atau tidak acuh, dan akibat yang ditimbulkannya bukanlah merupakan tujuannya, tetapi karena adanya kelalaian yang terjadi di luar kehendaknya. Misalnya menelantarkan pasien dan tidak mengobatinya sebagaimana mestinya sehingga pasien meninggal. Oleh sebab itu, masyarakat terutama yang terkena kasus atau keluarganya yang terkena kasus tersebut mengajukan tuntutan hukum. Tindakan tersebut adalah bagus kalau dilakukan secara proporsional, ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan. Hal ini menunjukkan pula adanya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hak-hak pasien yang dimilikinya selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan alasan tersebut maka dibutuhkanlah suatu perlindungan hukum bagi pasien (konsumen jasa pelayanan kesehatan) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya "menderita".<sup>4</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien

---

4 Anonim, 2013, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses tanggal 12 September 2013.

adalah sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Malapraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malapraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar).<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan ialah terdiri dari:

1. tenaga medis (dokter dan dokter gigi);
2. tenaga keperawatan;
3. tenaga kefarmasian;
4. tenaga kesehatan masyarakat;
5. tenaga gizi;
6. tenaga keterampilan fisik; dan
7. tenaga kesehatan medis.

#### **a. Hak Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan**

Hak dan kewajiban pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan didasari dengan adanya hubungan hukum antara pasien dengan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbintenis*). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang.<sup>7</sup> Perikatan antara rumah

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2013, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 12 September 2013

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 167

---

<sup>7</sup> Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, hal. 29.

sakit/dokter dan pasien dapat diartikan sebagai perikatan usaha (*inspanning verbintenis*) atau perikatan hasil (*resultaats verbintenis*).

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yakni dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.

Dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum<sup>8</sup>

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu :

- a) *the right to safe products;*
- b) *the right to be informed about products;*
- c) *the right to be definite choices in selecting products;*
- d) *the right to be heard regarding consumer products.*<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memang tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban pasien, tetapi karena pasien juga merupakan konsumen yaitu konsumen jasa kesehatan maka hak dan kewajibannya juga mengikuti hak dan kewajiban konsumen secara keseluruhan. Adapun hak konsumen yaitu:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>8</sup> Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenai Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 24.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hal.27.

- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien yang berhak atas keselamatan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.

Hak pasien lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada dokter atau pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan **opini kedua** (*second opinion*) juga mendapatkan rekam medik (*medical*

*record*) yang berisikan riwayat penyakit dirinya.<sup>10</sup>

## **b. Upaya Penyelesaian Kasus Malpraktik**

Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya adalah hukum substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi tidak mengenal bangunan hukum “malpraktik”.<sup>11</sup> Kalau ditinjau dari budaya hukum Indonesia, malpraktek merupakan sesuatu yang asing, karena batasan pengertian malpraktek yang diketahui dan dikenal oleh kalangan medis (kedokteran) dan hukum berasal dari alam pemikiran barat.<sup>12</sup> Permasalahan malpraktek di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (peradilan) dan jalur non litigasi (diluar peradilan).

### **Jalur litigasi**

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui

10 Titik Triwulan dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 31

11 Anny Isfandyarie, *op.cit*, h. 74.

12 *Ibid*.

peradilan yang berbeda di lingkungan peradilan umum.

Pasal 45 ayat (3) mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan di peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administratif di dalamnya.

### **Jalur Non Litigasi**

Di Indonesia, penyelesaian kasus malpraktek medik mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran mengatur pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan akibat praktek kedokteran yang mereka anggap tidak tepat dapat mengadukan kasusnya melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang merupakan jalur non litigasi. Selain melalui jalur non litigasi, pasien atau keluarga pasien yang menduga telah terjadi malpraktek atas diri pasien tidak tertutup kemungkinan untuk

sekaliigus menempuh jalur litigasi, yaitu melalui jalur perdata atau pidana.

Kewenangan MKDKI diatur dalam pasal 67, dimana MKDKI berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Sanksi yang diberikan dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau kedokteran gigi.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (Ikatan Dokter Indonesia/IDI atau Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia/PDGI). Kasus tersebut kemudian akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) IDI atau MKEK Gigi adalah suatu badan peradilan profesi, yang bertugas mengadili anggota ikatan profesi itu sendiri. Namun apabila suatu kasus diduga malpraktek medik diadukan oleh masyarakat dan didapati pelanggaran hukum, MKDKI akan menganjurkan

supaya kasus itu langsung dibawa ke sidang pengadilan untuk diperiksa. Oleh karena Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran hanya fokus pada disiplin kedokteran saja, sehingga masalah gugatan perdata atau pidana diserahkan kepada peradilan umum dengan memakai saksi ahli (*expert witness testimonum*) apabila diperlukan sebagaimana lazimnya juga di luar negeri.<sup>13</sup>

Untuk mengatasi kerumitan proses peradilan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memberi jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 45 ayat (4) mengatur, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti penyelesaian pengadilan pun tetap terbuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Tafsir yang lebih jauh dari ketentuan pasal tersebut, bahwa :

- (1) penyelesaian di luar pengadilan merupakan upaya perdamaian diantara pihak yang bersengketa dan (2)

penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui suatu badan independen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika penyelesaian melalui BPSK maka salah satu pihak tidak dapat menghentikan perkaranya di tengah jalan, sebelum BPSK menjatuhkan putusan. Artinya bahwa mereka terikat untuk menempuh proses penyelesaian sampai saat penjatuhan putusan.

## Penutup

Hak pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan meliputi hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta hak untuk mendapatkan *second opinion* dan rekam medik. Apabila terjadi malpraktik maka penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi.

Seiring perkembangan teknologi medis diharapkan pula dapat dibentuknya suatu peraturan hukum yang komprehensif yang khusus mengatur mengenai hukum kesehatan ini, sehingga diharapkan masyarakat pun lebih dapat memahami hak-hak yang mereka miliki sebagai pasien yang menggunakan jasa pelayan kesehatan dan juga sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga

---

<sup>13</sup> Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV.Andi, Yogyakarta, h. 87.



kesehatan agar dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus kelalaian medik dan malpraktek di Indonesia.

Diharapkan juga terjadi harmonisasi antara peraturan hukum pidana dan perdata dengan kode etik tenaga kesehatan sehingga dalam penyelesaian sengketa kasus malpraktek tidak terjadi kerancuan dalam proses penyelesaian suatu kasus malpraktek melainkan dapat saling melengkapi sehingga kasus malpraktek dapat terselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Isfandyarie, Anny, 2006, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.
- Triwulan, Titik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Yunanto, Ari dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV.Andi, Yogyakarta.
- Anonim, 2013, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2013, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.
- SG Wibisono, 2013, "Sampai Akhir 2012, Terjadi 182 Kasus Malpraktek" <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/Terjadi-182-Kasus-Malpraktek>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.